

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat beberapa waktu terakhir ini. Perkembangan ini juga dialami oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Menurut (Pebriani, 2019), Era reformasi keuangan sektor publik menjadi fenomena baru serta berdampak pada meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap suatu pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Peraturan Undang-undang No. 14 tahun 2008 yang mengatur Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yaitu informasi yang sifatnya wajib disediakan lalu diumumkan secara bertahap oleh pemerintah daerah selaku badan publik yaitu informasi mengenai laporan keuangan. Selain itu ada juga peraturan Presiden No. 3 tahun 2003 yang mengatur Kebijakan dan Strategi Nasional untuk mengembangkan *E-Government* . yaitu pemerintah daerah diwajibkan untuk memiliki website yang dapat di akses oleh seluruh masyarakat.

Dalam mewujudkan transparansi maka diperlukan adanya peran bukan hanya dari pihak internal Pemerintah Daerah, namun juga dari pihak eksternal. Pada era reformasi, peran eksternal semakin dirasakan keberadaannya dikarenakan demokrasi yang semakin terbuka kepada publik. Dengan semakin terbukanya akses publik terhadap pengelolaan keuangan daerah, maka hal ini dapat memberikan tekanan kepada pengelola keuangan daerah dalam hal transparansi pelaporan keuangan (Mardiasmo, 2006). Tekanan eksternal ini berasal dari luar organisasi yaitu seperti peraturan yang dikeluarkan oleh

pemerintah. Adanya peraturan tersebut ditunjukkan untuk mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih baik (Ridha, Basuki 2012).

Selain tekanan eksternal, gaya kepemimpinan juga berpengaruh dalam transparansi pelaporan keuangan. Gaya kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerja sama dan kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerja sama dan orang-orang di luar kelompok atau organisasi (Maryati, 2010). Gaya kepemimpinan dalam instansi pemerintah dapat membantu menerapkan transparansi pelaporan keuangan, karena seorang pemimpin akan sangat mempengaruhi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan keberhasilan, dalam mencapai tujuan instansi pemerintah yang dipimpinnya.

Kemudian atas pertimbangan transparansi pelaporan keuangan dalam pemerintahan, perlu untuk memperhatikan faktor politik. faktor politik dapat menjadi pertimbangan atas transparansi pelaporan keuangan. Faktor politik berperan dalam membuat sebuah regulasi dan aturan didalam pemerintah (DiMaggio & Powell, 1983). Berjalan atau tidaknya implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh lingkungan berpolitikan suatu negara yang mana dapat berlangsung dari lingkup internal, eksternal, resmi, maupun non resmi.

Dan pada era digital saat ini pemerintah di Indonesia membuat reformasi baru dalam sistem keuangan Negara. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan

Keuangan Daerah telah merancang program aplikasi penganggaran berbasis digital berupa *e-budgeting* yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah sehingga prinsip tata kelola keuangan yang baik dapat diterapkan dan berdampak kepada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia (Nasution & Ramadhan, 2019). Penganggaran secara elektronik (*E-Budgeting*) sendiri adalah suatu sistem penganggaran yang berbasis web/aplikasi program untuk memfasilitasi proses penganggaran daerah (Rahman et al, 2018). jadi Semakin baik pengimplementasian *e-budgeting* maka akan memperoleh manfaat proses transaksi lebih cepat, akurat dan informasi lebih relevan dan dapat diuji kebenarannya.

Menurut PP 71 Standar Akuntansi Pemerintah tahun 2010 menyatakan bahwa transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi pelaporan keuangan dapat diwujudkan melalui publikasi media massa atau mengundang perwakilan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat memanfaatkan keberadaan website resmi pemerintah daerahnya masing-masing untuk mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan daerah tersebut (Abdul Halim, 2016).

Sesuai peraturan Presiden No. 3 tahun 2003. Pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah telah memiliki website resmi yang dapat diakses. Namun publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui surat kabar, internet ataupun cara lain nampaknya belum menjadi hal yang umum. Hal ini bisa

dilihat dari konten-konten yang ditampilkan pada *website* resmi yang dimiliki tersebut bahwa ternyata tidak ada konten yang menyajikan terkait transparansi yaitu laporan keuangan pemerintah daerah, APBD Kabupaten Halmahera Tengah hanya ada di 3 tahun terakhir saja yaitu tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024. Selanjutnya pengamatan berdasarkan update data *website* resmi Kabupaten Halmahera Tengah (haltengkab.go.id) menunjukkan tidak adanya update data transparansi anggaran secara berkala.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang transparansi pelaporan keuangan dimana organisasi diharuskan membuat laporan keuangan bebas salah saji material dan informasinya diketahui oleh publik yang memerlukan, terutama untuk laporan keuangan pemerintah. Pada konsep keterandalan (*reability*) dimana informasi pada laporan keuangan dapat dimengerti dan tidak terdapat kesalahan material, dan memberikan fakta yang jujur, dapat mudah diverifikasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi anggaran masih merupakan sesuatu yang "langka". Fenomena ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi pelaporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah belum menunjukkan penerapan transparansi yang baik.

Penelitian tentang transparansi pelaporan keuangan telah banyak dilakukan sebelumnya dan memperoleh hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Andriyani (2016) mengatakan bahwa tekanan eksternal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Lubis (2017) dan Rahayau (2020) melakukan penelitian yang sama dan memperoleh hasil yang mendukung penelitian sebelumnya bahwa tekanan eksternal

berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2015) dan Zenita dkk., (2021) bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya dan menjelaskan bahwa tekanan eksternal tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Andriyani (2016) dalam penelitiannya mengatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hasil ini sejalan dengan Suaydah (2019) yang mengatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Namun Widya (2017) berpendapat lain bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Fardian (2014), Umaroh (2017) dan Davici (2018) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor politik berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan berbeda dengan penelitian sebelumnya Suaydah (2019) dan Dewi (2015) dengan variable yang sama menunjukkan bahwa faktor politik tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasution & Ramadhan, (2019) menunjukkan bahwa Implementasi *e-budgeting* berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution & Atika, (2019) yang mengatakan bahwa implementasi *e-budgeting* berpengaruh terhadap penerapan transparansi keuangan daerah. Namun berbeda dengan Yomitami (2020) dengan variable yang sama menunjukkan bahwa *e-budgeting* tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan.

Penelitian ini mereplikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andriyani (2016) yang meneliti tentang pengaruh tekanan eksternal, komitmen manajemen, ketidakpastian lingkungan, gaya kepemimpinan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi pelaporan keuangan dengan sampel kasubag keuangan dan staff keuangan OPD Pemerintah Kabupaten Palalawan. Hasilnya menunjukkan bahwa tekanan eksternal, komitmen manajemen, gaya kepemimpinan, dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Namun ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Perbedaan penelitian Andriyani (2016) dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah yang pertama, peneliti menambahkan faktor politik dan implementasi *e-budgeting* sebagai variabel baru yang tidak ada pada penelitian Andriyani (2016). Serta menghilangkan variabel dependen lain dari penelitian Andriyani (2016) yaitu ketidakpastian lingkungan dan aksesibilitas laporan keuangan karna menurut *research gap* yang dilakukan menunjukkan hasil yang konsisten.

Kedua, perbedaan pada metode pengambilan sampel. Jika pada penelitian yang dilakukan Andriyani (2016) pengambilan sampel menggunakan metode sensus yaitu seluruh populasi dijadikan sampel penelitian (seluruh OPD pemerintah Kabupaten Palalawan yang berjumlah 32 OPD), maka pada penelitian ini peneliti menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel menggunakan kriteria dalam menentukan sampel penelitian

ini yaitu 21 OPD berbentuk Dinas dari 34 OPD yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah.

Maka dari itu dengan fenomena dan *research gap* diatas, penulis tertarik menggunakan judul penelitian **“Pengaruh Tekanan Eksternal, Gaya Kepemimpinan, Faktor Politik, dan Implementasi *E-budgeting* Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Kabupaten Halmahera Tengah)”**.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah tekanan eksternal berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah?
2. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah?
3. Apakah faktor politik berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah?
4. Apakah implementasi *E-budgeting* berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji, terkait dengan:

1. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh tekanan eksternal terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah

2. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh gaya kepemimpinan terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah
3. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh faktor politik terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah
4. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh implementasi *E-Budgeting* terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan urian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka kegunaan dan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan secara teoritis mampu memberikan suatu yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan memperkaya wawasan tentang tekanan eksternal, Gaya kepemimpinan, faktor politik, dan implementasi *e-budgeting*, dalam pengaruhnya terhadap transparansi pada akuntansi pemerintah khususnya pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate.

2. Manfaat Paraktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh tingkat transparansi pelaporan keuangan yang telah dilaporkan. Pemahaman terhadap faktor–faktor penerapan transparansi pelaporan keuangan dapat memberikan masukan dan gambaran bagi

Kepala Daerah guna memperbaiki, meningkatkan, dan memformulasikan kebijakannya di masa yang akan datang.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi, masukan dan pertimbangan untuk pemerintah agar bisa menentukan penilaian atau bahkan *punishment dan reward* yang bisa diterapkan dalam hal transparansi pelaporan keuangan sesuai SAP yang harus dilakukan pemerintah daerah.